

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI
DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI



Oleh :

KHAFID NASRULLAH

NIM. 21020090

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI CENDEKIA
BOJONEGORO
TAHUN 2025**

**ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI
KINERJA KEUANGAN PADA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN BOJONEGORO**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat guna
mencapai gelar Sarjana Akuntansi pada
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Oleh :
Khafid Nasrullah
NIM. 21020090

Menyetujui :

Dosen Pembimbing I



Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., AK

NUPTK: 9345762663130203

Dosen Pembimbing II



Hasan Bisri, SE., MSA.

NUPTK: 3547751652130102

Dipertahankan di Depan Panitia Penguji
Skripsi Program Studi Akuntansi
STIE CENDEKIA BOJONEGORO

Oleh :

Nama Mahasiswa : Khafid Nasrullah
NIM : 21020090

Disetujui dan diterima Pada :

Hari, tanggal : Sabtu, 12 Juli 2025

Tempat : Ruang G (Hall Stiekia)

Dewan Penguji Skripsi :

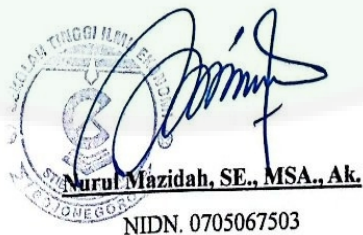
1. Ketua Penguji : Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak
2. Sekretaris Penguji : Hasan Bisri, SE., MSA.
3. Anggota Penguji : Dra. Susilowati Rahayu, MM.



Disahkan oleh :

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cendekia Bojonegoro

Ketua



Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak.
NIDN. 0705067503

MOTTO

Segala hal yang nyata dan kamu inginkan tetapi belum dapat kamu raih adalah fiksi, tetapi semua mimpi yang fiksi dan kamu usahakan adalah nyata
(Fredrik Ornata)

Be Teacher Of The World

Kupersembahkan untuk:

Orang tua tercinta Bapak Lasmari dan Ibu Siti Munawaroh
Saudaraku tersayang Lilis Nur Diana dan Ahmad Khusen
Adek-Adeku Tersayang M Umar Batistuta dan M Hasby Baihaqi
Almamater Kebanggaanku STIE Cendekia

ABSTRAK

Nasrullah Khafid, 2025. *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, Skripsi*. Akuntansi. STIE Cendekia. Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA, Ak. Selaku pembimbing satu dan Hasan Bisri, SE., MSA Selaku pembimbing dua.

Kata Kunci: Laporan Realisasi Anggaran, Kinerja Keuangan, Disdagkop-UM

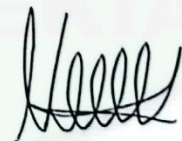
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan pendekatan analisis dokumen terhadap data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2022 hingga 2024. Penilaian kinerja keuangan dilakukan dengan menggunakan dua rasio utama, yaitu rasio efektivitas dan efisiensi. Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata rasio efektivitas penerimaan PAD selama tiga tahun sebesar 53,03% yang termasuk dalam kategori tidak efektif. Sementara itu, rasio efisiensi anggaran belanja mencapai rata-rata 79,55%, yang dikategorikan cukup efisien. Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun pengeluaran dinas cukup terkendali, pencapaian target penerimaan masih belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan strategi pengelolaan anggaran, peningkatan sumber PAD, serta pengawasan dan evaluasi berkala untuk meningkatkan kinerja keuangan instansi secara menyeluruh.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Nama Lengkap : Khafid Nasrullah
NIM : 21020090
Tempat, Tanggal lahir : Bojonegoro, 17 Juni 2001
Agama : Islam
Pendidikan Sebelumnya : SMK Budi Utomo Jombang
Nama Orangtua/Wali : Lasmari
Alamat Rumah : Dsn Bomo Ds Ngrandu RT 22 RW 04 Kec
Kedungadem Kab Bojonegoro
Judul Skripsi : Analisis Laporan Realisasi Anggaran
Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha
Mikro Kabupaten Bojonegoro

Bojonegoro, 12 Juli 2025

Penulis



Khafid Nasrullah

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khafid Nasrullah

NIM : 21020090

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya yang berjudul analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada dinas perdagangan koperasi dan usaha mikro kabupaten bojonegoro adalah asli hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan plagiasi dari karya orang lain, maka saya bersedia ijazah dan gelar Sarjana ~~Manajemen~~/Akuntansi yang saya terima dari STIE Cendekia untuk ditinjau kembali.

Bojonegoro, 12 Juli 2025

Yang Menyatakan

A 1000 Rupiah meter stamp with a signature over it. The stamp is rectangular and features the Garuda Pancasila emblem. The text on the stamp includes "1000", "METER TEMPIL", and the serial number "49A9AMX43257496".

Khafid Nasrullah

21020090

STIE CENDEKIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) pada Program Studi Akuntansi STIE Cendekia Bojonegoro. Selain sebagai syarat akademik, penyusunan skripsi ini juga bertujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan, baik bagi penulis secara pribadi maupun bagi pembaca yang membutuhkan referensi dalam bidang yang relevan.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Nurul Mazidah, SE., MSA., Ak., selaku Ketua STIE Cendekia Bojonegoro.
2. Ibu Dina Alafi Hidayatin, SE., MA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi STIE Cendekia Bojonegoro.
3. Bapak Hermawan Budi Prasetyo, SE., MSA., Ak. selaku dosen pembimbing I
4. Bapak Hasan Bisri, SE., MSA. selaku dosen pembimbing II
5. Seluruh dosen, staf, dan rekan-rekan di STIE Cendekia Bojonegoro yang telah banyak membantu secara langsung maupun tidak langsung.
6. Kedua orang tua tercinta yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan moril maupun materiil yang tak ternilai harganya.
7. Juga pihak lain yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Sebagai manusia biasa, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin yaa Rabbal 'Aalamiin.

Bojonegoro, 12 Juli 2025

Penulis



Khafid Nasrullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
BIODATA PENULIS.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi dan Cakupan Masalah.....	3
a. Identifikasi Masalah.....	3
b. Cakupan Masalah.....	4
3. Rumusan Masalah.....	4
4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
a. Tujuan penelitian.....	4
b. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR	
1. Kajian Teori.....	7
2. Kajian Empiris.....	12
3. Kerangka Berpikir.....	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
1. Metode dan Jenis Penelitian.....	17
a. Metode penelitian.....	17
b. Jenis penelitian.....	17
2. Jenis dan Sumber Data.....	17
a. Jenis Data.....	17
b. Sumber Data.....	18
3. Populasi, Sampel, dan Teknik sampling.....	18
a. Populasi.....	18
b. Sampel dan Teknik sampling.....	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	19
5. Teknik Analisis Data.....	19
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Gambaran Singkat Obyek Penelitian.....	24
a. Profil Singkat dan Alamat.....	24
b. Visi Misi.....	24
c. Struktur Organisasi.....	26
d. Struktur Jabatan.....	27
2. Hasil Penelitian dan Analisis Data.....	28
a. Rasio Efektifitas.....	28
b. Rasio Efisiensi.....	31
3. Pembahasan.....	34
a. Pembahasan Hasil Rasio efektifitas.....	35
b. Pembahasan Hasil Rasio efisiensi.....	37

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan.....	40
2. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

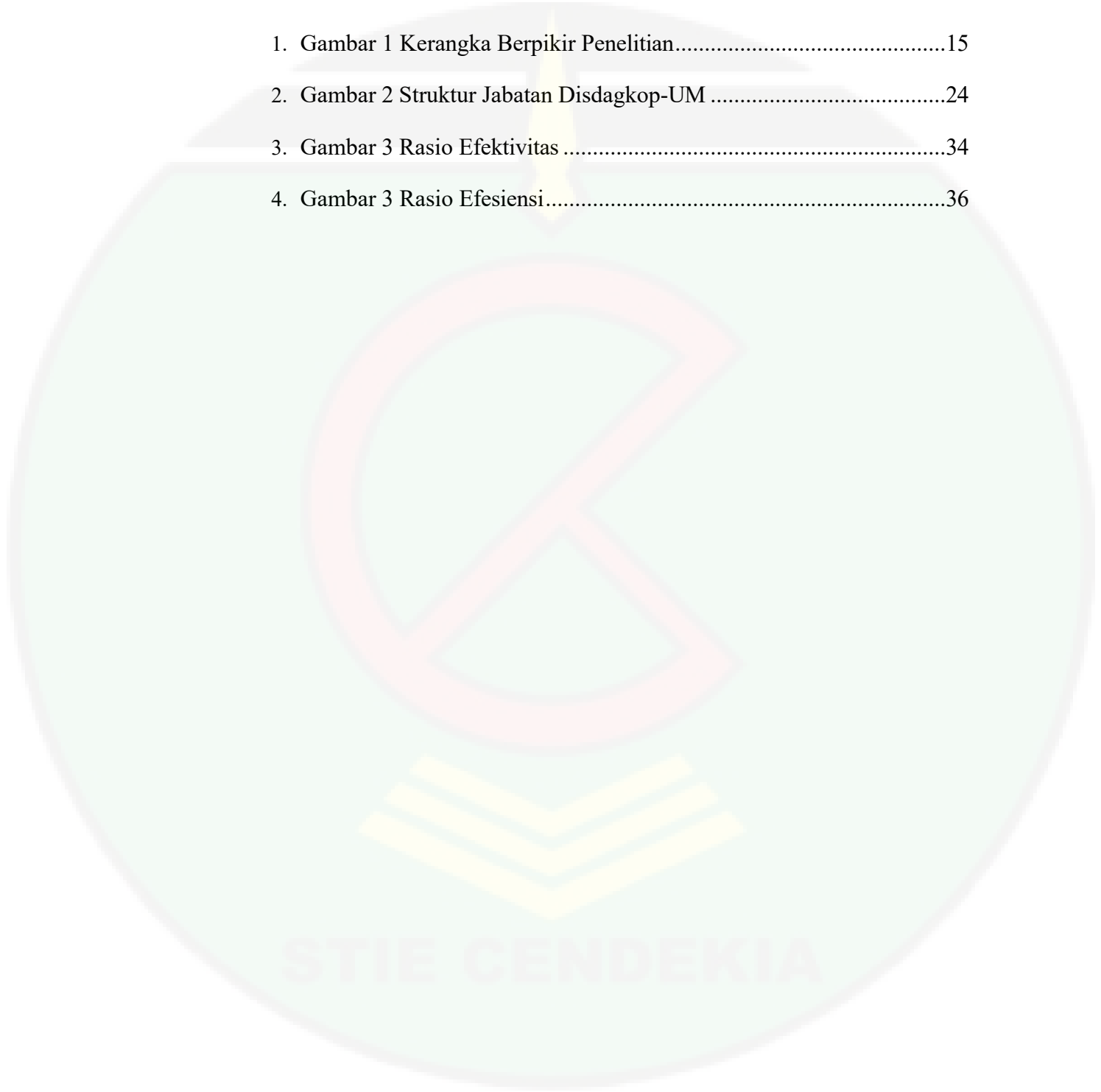


DAFTAR TABEL

1. Tabel 1 Penelitian Terdahulu	12
2. Tabel 2 Struktur Jabatan dan Tugas Disdagkop-UM	25
3. Tabel 3 Kriteria Penilaian Kinerja Efektivitas	27
4. Tabel 4 Target Penerimaan PAD dan Realisasi Anggaran	27
5. Tabel 5 Rasio Efektivitas PAD Disdagkop-UM	28
6. Tabel 6 Kriteria Penilaian Kinerja Efisiensi	30
7. Tabel 7 Target Belanja dan Realisasi Belanja	30
8. Tabel 8 Rasio Efisiensi Target dan Realisasi Belanja Disdagkop-UM	31

DAFTAR GAMBAR


1. Gambar 1 Kerangka Berpikir Penelitian.....	15
2. Gambar 2 Struktur Jabatan Disdagkop-UM	24
3. Gambar 3 Rasio Efektivitas	34
4. Gambar 3 Rasio Efisiensi.....	36



STIE CENDEKIA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022
2. Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023
3. Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024



STIE CENDEKIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keuangan daerah merupakan keseluruhan hak serta kewajiban yang dimiliki pemerintah daerah dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan, yang pencatatannya dinilai atau diukur dengan satuan uang. Keuangan daerah mencakup berbagai jenis harta yang berkaitan dengan hak dan kewajiban tersebut, dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2007.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan ini memuat data realisasi anggaran yang berperan penting dalam mengukur kinerja keuangan. Informasi yang disajikan di dalamnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi, sehingga realisasi anggaran pada tahun-tahun berikutnya dapat ditingkatkan. Evaluasi terhadap kinerja keuangan instansi pemerintah, seperti Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro, menjadi hal yang krusial untuk dilakukan dan menjadi salah satu aspek vital dalam mewujudkan tata kelola yang baik dan transparansi penggunaan anggaran. Laporan ini mencerminkan sejauh mana pencapaian target anggaran yang telah direncanakan dan realisasi yang tercapai.

Namun, sering kali terdapat perbedaan dalam pelaksanaan anggaran yang dapat berdampak Dalam pencapaian tujuan dan target yang telah

ditetapkan, sering kali terjadi perbedaan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi yang diperoleh, baik pada sisi pengeluaran maupun pendapatan. Hal ini penting untuk diteliti karena ketidaksesuaian dalam penggunaan anggaran tidak hanya beresiko merugikan keuangan daerah, tetapi juga hal tersebut berpotensi menghalangi terwujudnya tujuan kebijakan yang telah dirumuskan seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan sektor ekonomi lokal.

Laporan realisasi merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program atau kegiatan yang telah direncanakan, yang berisi data mengenai hasil aktual yang dicapai dalam periode tertentu. Melalui laporan ini, dapat diketahui sejauh mana kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana, baik dari sisi fisik maupun keuangan, sehingga menjadi dasar penting dalam mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Laporan realisasi memberikan gambaran tentang pelaksanaan anggaran selama periode tertentu dengan membandingkan antara rencana dan realisasinya (Mardiasmo, 2017) yang menunjukkan perbandingan antara rencana anggaran dan hasil realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Anggaran adalah perencanaan yang dibuat secara teratur menggunakan angka dan diukur dengan uang, yang mencakup semua kegiatan sebuah organisasi atau perusahaan selama periode tertentu ke depan. Karena berbentuk satuan moneter, anggaran kerap disebut sebagai rencana keuangan. Menurut Fuad dkk. (2020:15), anggaran adalah perencanaan terstruktur yang dituangkan dalam bentuk angka dan diungkapkan dalam satuan uang, meliputi

seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 02 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan salah satu laporan keuangan utama yang dipakai untuk menilai kinerja keuangan entitas pemerintah, termasuk SKPD seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro. PSAP menyebutkan bahwa kinerja keuangan dapat dievaluasi dengan membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dan realisasi pelaksanaannya. Selanjutnya, menurut Prastowo (2015:50), salah satu metode untuk menilai kinerja keuangan adalah dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai alat untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. LRA adalah salah satu laporan pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengetahui kondisi keuangan daerah. Dengan memanfaatkan LRA pembaca laporan dapat melakukan evaluasi terhadap kinerja keuangan, menilai pencapaian target anggaran, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan realisasi anggaran di masa mendatang. Hal ini sekaligus mendukung penerapan tata kelola keuangan daerah yang baik.

B. Identifikasi Masalah dan Cakupan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Setiap instansi pemerintah memiliki tanggung jawab dalam mengelola anggaran daerah dengan baik supaya pelaksanaan program dan kegiatan berlangsung sesuai dengan yang telah direncanakan. Hal ini menunjukkan perlu adanya analisis bidang pengelolaan keuangan yang lebih lanjut. Meskipun Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro telah menyusun laporan realisasi anggaran secara rutin setiap tahun, pemanfaatannya sebagai alat evaluasi kinerja keuangan belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya evaluasi yang lebih terstruktur dalam pengelolaan keuangan guna mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

2. Cakupan Masalah

Penelitian ini berfokus tentang menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk menilai Kinerja Keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro kab Bojonegoro. Cakupan difokuskan pada periode anggaran tahun 2022 hingga 2024.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian pada Latar Belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pemanfaatan Laporan Realisasi Anggaran untuk menilai kinerja keuangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro?”

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kinerja keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro telah berjalan secara optimal, dengan menitikberatkan pada pemanfaatan Laporan Realisasi Anggaran sebagai acuan penilaiannya.

2. Manfaat Penelitian

a. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, dalam meningkatkan pengelolaan anggaran. Dengan menganalisis Laporan Realisasi Anggaran, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi kelemahan dan penyimpangan yang perlu diperbaiki.

b. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur di bidang akuntansi dan manajemen keuangan publik, khususnya mengenai pemanfaatan Laporan Realisasi Anggaran berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kinerja keuangan instansi pemerintah, dan hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas kinerja keuangan.

c. Bagi Masyarakat Umum

Memberikan gambaran bagaimana penggunaan anggaran pemerintah dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dengan

demikian, masyarakat diharapkan lebih sadar akan pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap anggaran daerah yang digunakan untuk kepentingan umum.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya serta menambah wawasan mengenai pentingnya Laporan Realisasi Anggaran sebagai alat evaluasi kinerja keuangan yang efektif, yang dapat diterapkan pada instansi pemerintah di daerah lain.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR

A. Kajian Teori

Dalam penelitian ini kajian teori berperan sebagai landasan ilmiah yang kuat dalam rangka menganalisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan dokumen yang menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang terjadi pada suatu entitas pemerintah dalam periode tertentu, serta membandingkannya dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan ini berfungsi sebagai alat untuk menilai pencapaian kinerja keuangan pemerintah, baik di tingkat daerah maupun pusat, sekaligus menjadi instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Data yang terkandung dalam LRA menjadi dasar penting dalam proses evaluasi kinerja keuangan serta acuan dalam pengambilan keputusan fiskal di masa mendatang (Mardiasmo, 2018:62).

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), LRA terdiri atas beberapa unsur yang menjadi komponen utama dalam penyajian laporan anggaran pemerintah antara lain :

a. Pendapatan

Merupakan penerimaan yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah dan menjadi hak pemerintah, yang menyebabkan bertambahnya saldo anggaran lebih pada tahun anggaran berjalan. Penerimaan ini bersifat final dan tidak menimbulkan kewajiban pengembalian oleh pemerintah.

b. Belanja

Segala bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh Bendahara Umum Negara atau Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih pada tahun anggaran berjalan, dan sifatnya tidak dapat ditagih kembali kepada pemerintah.

c. Transfer

Segala penerimaan maupun pengeluaran dana yang dilakukan antar entitas pelaporan, termasuk di dalamnya dana perimbangan serta dana bagi hasil.

d. Pembiayaan

Merupakan transaksi penerimaan atau pengeluaran yang tidak memengaruhi besaran kekayaan bersih entitas, namun memiliki kewajiban untuk dibayar atau diterima kembali, baik pada tahun anggaran berjalan maupun periode berikutnya. Dalam konteks anggaran pemerintah, pembiayaan digunakan terutama untuk menutup defisit atau mengelola surplus anggaran. Sumber penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman maupun hasil investasi.

e. Surplus/Defisit Anggaran

Adalah selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah belanja. Apabila pendapatan melebihi belanja, terjadi surplus; sebaliknya, jika belanja lebih

besar dari pendapatan, terjadi defisit. Kondisi ini merefleksikan posisi fiskal pemerintah dalam suatu periode anggaran.

2. Tujuan Analisis Laporan Realisasi Anggaran

- a. Untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan oleh suatu entitas, seperti pemerintah pusat, daerah, atau lembaga. Melalui analisis ini, dapat diketahui sejauh mana anggaran pendapatan dan belanja yang telah disusun dalam APBN/APBD atau rencana keuangan lembaga tersebut benar-benar direalisasikan dalam pelaksanaannya.
- b. Penting untuk menilai akuntabilitas pelaksanaan anggaran oleh instansi pemerintah. LRA menjadi dokumen penting yang menunjukkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran, sehingga sangat relevan bagi pengawasan publik maupun auditor. Lebih lanjut, hasil analisis LRA menjadi input penting dalam proses penyusunan anggaran di tahun-tahun berikutnya, agar alokasi anggaran bisa lebih realistis dan tepat sasaran. Dengan begitu, perencanaan anggaran menjadi lebih berkualitas dan berdampak nyata untuk menilai kinerja keuangan bagi pembangunan dan pelayanan publik.

3. Kinerja keuangan

Kinerja keuangan merupakan cerminan dari seberapa baik suatu instansi pemerintah dalam mengatur serta memanfaatkan sumber daya keuangan secara optimal guna mewujudkan target dan tujuan yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran. Pada Dinas Perdagangan, Koperasi,

dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. kinerja keuangan sangat berkaitan dengan pelaksanaan program-program yang mendukung pertumbuhan sektor perdagangan, penguatan koperasi, dan pemberdayaan usaha mikro. Menurut Mahsun “Salah satu alat utama untuk menilai kinerja keuangan tersebut adalah melalui analisis laporan realisasi anggaran” (2017:120)

(Mardiasmo, *Akuntansi sektor publik*, 2017:133) Penilaian kinerja keuangan dalam instansi pemerintah daerah, seperti Dinas Perdagangan, mencakup beberapa aspek utama yaitu :

a. Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menunjukkan sejauh mana rencana anggaran yang ditetapkan dapat direalisasikan. dalam teori pencapaian tujuan (Goal-Attainment Theory), Efektivitas adalah keterkaitan antara hasil yang dicapai (output) dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Ukuran efektivitas menunjukkan sejauh mana dampak dan hasil (outcome) dari suatu program berkontribusi terhadap pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Semakin besar peran output dalam mewujudkan sasaran tersebut, semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja sebuah unit organisasi. Berdasarkan Kepmendagri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, tingkat efektivitas penerimaan PAD dapat dihitung menggunakan rumus dan kriteria tertentu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penjelasan Rumus :

1. Realisasi Penerimaan PAD = total pendapatan daerah yang benar-benar berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber PAD (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dll).
2. Target Penerimaan PAD = jumlah PAD yang ditetapkan dalam APBD.

Penelasan Kriteria :

1. Jika realisasi PAD melebihi 100% dari target, maka kinerjanya digolongkan sangat efektif
2. Penerimaan PAD tergolong efektif apabila realisasi yang dicapai berada pada kisaran 90% hingga 100% dari target yang telah ditetapkan.
3. Jika tingkat realisasi berada di rentang 80% sampai 90%, maka penerimaan PAD dikategorikan cukup efektif.
4. Sedangkan capaian antara 60% hingga 80% menunjukkan bahwa penerimaan PAD berada pada kategori kurang efektif.

b. Rasio Efisiensi

Menurut teori nilai untuk uang (Value for Money), efisiensi diukur dari perbandingan antara input (anggaran) dan output (hasil kegiatan). Jika suatu kegiatan dapat dilaksanakan dengan biaya yang lebih rendah tanpa mengurangi kualitas hasil, maka organisasi tersebut efisien. Kepmendagri No. 690.900-327 Tahun 1996, Rumus dan kriteria tingkat efisiensi penerimaan PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penjelasan Rumus

1. Realisasi Belanja = jumlah pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan pemerintah daerah selama satu periode anggaran.
2. Anggaran Belanja = jumlah dana yang telah direncanakan dan disahkan dalam APBD untuk dikeluarkan selama periode tersebut.

Penjelasan Kriteria :

1. Belanja anggaran diklasifikasikan tidak efisien apabila persentase perbandingan realisasi terhadap anggaran melebihi 100%.
2. Jika persentase tersebut berada pada kisaran 90% hingga 100%, maka termasuk kategori kurang efisien.
3. Capaian di rentang 80% sampai 90% menunjukkan belanja anggaran cukup efisien.
4. Apabila persentasenya berada antara 60% hingga 80%, maka dinilai efisien.
5. Apabila belanja anggaran dikategorikan sangat efisien jika persentase pencapaiannya berada di bawah 60%.

B. Kajian Empiris

Kajian empiris merupakan penelitian terdahulu yang berisi hasil-hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, di mana penelitian tersebut relevan dengan penelitian yang sedang dikerjakan penelitian ini, uraian hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai referensi disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama peneliti dan tahun penelitian	Judul penelitian	Hasil penelitian	Persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya
1	<i>Eka Meiliya Dona dan Verza Ayu Lestari (2020)</i>	<i>“Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU”</i>	pengelolaan anggaran yang efisien dan efektif untuk mendukung kinerja keuangan daerah. Meski rasio efisiensi menunjukkan hasil yang cukup baik, ada ruang untuk perbaikan dalam hal rasio ekonomi. Juga tingkat efektivitas menunjukkan bahwa anggaran yang dikelola telah mencapai sasaran yang ditetapkan.	<p>Persamaan : Sama-sama menggunakan laporan realisasi anggaran sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan instansi pemerintah dan juga untuk mengetahui sejauh mana laporan realisasi anggaran yang diterima</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu lebih bersifat umum, yaitu menilai kinerja keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, sedangkan skripsi ini berfokus pada unit kerja tertentu, yaitu Dinas Perdagangan, Usaha Mikro, dan Koperasi, sehingga analisisnya lebih spesifik dan mendalam terhadap sektor yang memiliki kontribusi langsung terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan.</p>

2	Ramadhani dan Handayani (2020)	<i>“Analisis Laporan Realisasi Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah”.</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Laporan Realisasi Anggaran memiliki peran penting sebagai alat kontrol (pengendalian) untuk menilai efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Penilaian efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara anggaran yang direncanakan dan yang terealisasi,	<p>Persamaan : Kedua penelitian memanfaatkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai sumber utama data dalam menilai kinerja keuangan instansi pemerintah.</p> <p>Perbedaan : Penelitian terdahulu berfokus pada penggunaan LRA sebagai alat kontrol anggaran secara umum di lingkungan pemerintah daerah, sedangkan skripsi ini lebih menitikberatkan pada analisis kinerja keuangan unit kerja tertentu, yaitu Dinas Perdagangan, Usaha Mikro, dan Koperasi.</p>
3	Arini dan Zulvianira Loekman (2023)	<i>Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020-2022</i>	Menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengalami fluktuasi/Ketidakkonsistena n selama periode tersebut, dengan beberapa rasio menunjukkan penurunan yang perlu mendapat perhatian.	<p>Persamaan: Kedua penelitian menggunakan analisis laporan kinerja keuangan untuk menilai kinerja keuangan.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini berfokus pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek, sementara penelitian ini berfokus pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.</p>
4	Siadin Andi Djemma, Andi Nurwana, dan	<i>Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk</i>	Terdapat ketidaksesuaian signifikan antara belanja yang direncanakan dan yang direalisasikan, terutama	<p>Persamaan: Fokus pada satu instansi dinas tertentu di tingkat kabupaten.</p> <p>Perbedaan: Instansi dan cakupan tugas berbeda. Dinas Perkimta lebih fokus pada infrastruktur dan</p>

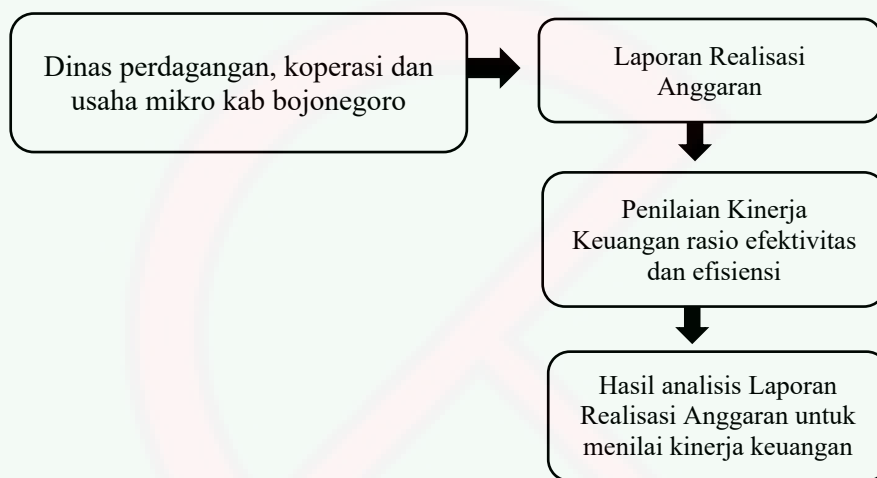
	<i>Rijal Israq A.B (2023)</i>	<i>Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Perkimta Kabupaten Wajo</i>	pada program pengentasan kawasan kumuh dan perlu evaluasi yang lebih intensif dalam proses perencanaan program untuk meningkatkan kinerja keuangan anggaran.	pemukiman, sedangkan dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro fokus pada penguatan ekonomi rakyat UMKM
5	<i>Tyta Nandung Ayu Rosanti dan Eko Triyanto (2023)</i>	<i>Analisis atas laporan realisasi anggaran sebagai alat ukur kinerja keuangan pada kantor pemerintah Kabupaten Klaten.</i>	Menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten masih belum optimal. Meskipun pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong sangat efektif dan efisien, tingkat kemandirian keuangan daerah masih rendah.	Persamaan : Keduanya sama-sama membahas analisis laporan realisasi anggaran untuk menilai kinerja keuangan suatu instansi pemerintahan. Perbedaan : analisis pada kantor kab Klaten cakupan fungsi anggaran bisa lebih luas sedangkan yang saat peneliti kerjakan Cakupan lebih fokus pada kegiatan ekonomi mikro, koperasi dan perdagangan UMKM

Sumber :

- 1 Skripsi dari Universitas Bina Darma (repositori.um-palembang.ac.id)
- 2 Skripsi dari Universitas Muhammadiyah Malang (e-journal.stiedharmaputera.ac.id)
- 3 Skripsi dari Universitas Trunojoyo (eprints.untag-sby.ac.id)
- 4 Skripsi dari Universitas Hasanuddin (repository.unhas.ac.id)
- 5 Skripsi dari Universitas Sebelas Maret (repository.unwidha.ac.id)

C. Kerangka Berfikir

Laporan realisasi anggaran menyajikan data realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan transfer yang dapat dibandingkan dengan anggaran untuk mengukur sejauh mana kinerja keuangan dinas telah sesuai dengan rencana. melalui analisis dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran dinas sudah optimal dalam mendukung program-program kerja dinas.



Gambar 1
Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Diolah oleh peneliti (2025)

Penjelasan Diagram Kerangka Berpikir

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi terkait realisasi pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, serta surplus/defisit. data ini menjadi dasar utama untuk melakukan penilaian terhadap bagaimana anggaran benar-benar dijalankan

2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan mencerminkan kemandirian fiskal suatu instansi pemerintah. dalam penelitian ini, kinerja keuangan diukur berdasarkan

seberapa baik realisasi anggaran mendukung program-program kerja dinas perdagangan, koperasi, dan usaha mikro kab bojonegoro

3. Hasil Analisis

Hasil analisis dari laporan LRA menghasilkan evaluasi atau Kesimpulan mengenai kinerja keuangan instansi tersebut

4. Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro

Keberadaan dan karakteristik khusus dari dinas ini memengaruhi hubungan antara LRA dan kinerja keuangan. dengan kata lain, bagaimana LRA berdampak pada kinerja keuangan bisa berbeda tergantung pada cara dinas perdagangan mengelola, mengimplementasikan, dan merealisasikan anggarannya. misalnya, dalam pengelolaan program UMKM akan memperkuat hubungan positif antara LRA dan kinerja keuangan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Dan Jenis Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah analisis dokumen (*documentary analysis*) dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi anggaran dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan kinerja keuangan berdasarkan data laporan realisasi anggaran.

B. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data deskriptif kuantitatif dan bersifat sekunder. Data kuantitatif digunakan karena penelitian ini menitikberatkan pada angka-angka yang terkandung dalam laporan realisasi anggaran dan laporan keuangan lainnya untuk dianalisis menggunakan rasio dan indikator kinerja keuangan. “Data sekunder adalah informasi yang didapatkan secara tidak langsung dari dokumen resmi atau laporan yang telah dipublikasikan” (Sugiyono, 2017:137). Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang dipublikasikan oleh BPKAD melalui website resmi pemerintah daerah.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari laporan realisasi anggaran tahunan, dimana laporan ini dipublikasikan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui website resmi pemerintah daerah dan permintaan data secara langsung ke dinas terkait melalui surat permohonan data

C. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi dapat dipahami sebagai sekumpulan objek maupun subjek yang memiliki jumlah serta karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk ditelaah sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan (Sugiyono, 2022:126). Dalam penelitian ini, yang dijadikan populasi adalah laporan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro. Maka populasi penelitian ini adalah laporan realisasi anggaran yang dipublikasikan oleh BPKAD melalui Website resmi pemerintah daerah dan Dinas Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

2. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel yang diambil berupa data laporan realisasi anggaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro dalam kurun waktu tertentu, yaitu tahun anggaran 2022 hingga 2024. Metode penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling, yaitu suatu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria

yang digunakan meliputi tersedianya laporan keuangan yang utuh dan sesuai, serta data yang dianggap mewakili kegiatan utama pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, proses pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang sesuai serta mendukung fokus penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Sugiyono (2018:476) menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh data maupun informasi dalam bentuk arsip, buku, dokumen, catatan angka, maupun gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat menunjang suatu penelitian. Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan melalui peninjauan dokumen dan arsip yang berhubungan dengan laporan keuangan, khususnya laporan realisasi anggaran pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Dokumen yang digunakan meliputi:

- a. Laporan realisasi anggaran tahun periode 2022-2024 yang dipublikasikan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melalui Website resmi pemerintah daerah Kabupaten Bojonegoro

D. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2019:320), analisis data merupakan suatu tahapan untuk menelusuri dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari

wawancara, catatan lapangan, maupun dokumentasi. Proses ini dilakukan dengan mengelompokkan data ke dalam kategori tertentu, rincinya menjadi bagian-bagian kecil, menyusunnya kembali dalam pola tertentu, menyeleksi informasi yang dianggap penting untuk dipelajari, hingga akhirnya menarik kesimpulan sehingga dapat dipahami baik oleh peneliti sendiri maupun orang lain.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro berdasarkan laporan realisasi anggaran dengan metode Pendekatan deskriptif kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan perhitungan rasio sebagai alat analisis.

1. Rasio Efektivitas

Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas dinas dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan lainnya.

Rumus yang digunakan sesuai Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900.327 Tahun 1996, terdapat kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat efektivitas penerimaan PAD, yaitu sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penjelasan Rumus :

- a. Realisasi Penerimaan PAD = total pendapatan daerah yang benar-benar

berhasil dikumpulkan dari sumber-sumber PAD (pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dll).

b. Target Penerimaan PAD = jumlah PAD yang ditetapkan dalam APBD.

Penjelasan Kriteria :

- a. Sangat efektif: Jika realisasi PAD melebihi 100% dari target.
- b. Efektif: realisasi mencapai antara 90% hingga 100% dari target.
- c. Cukup efektif: pencapaian berada dalam kisaran 80% hingga kurang dari 90%.
- d. Kurang efektif: realisasi berada pada rentang 60% hingga kurang dari 80%.
- e. Tidak efektif: pencapaian kurang dari 60% dari target.

2. Rasio Efisiensi

Rasio ini bertujuan untuk melihat apakah keuangan dikelola dengan hemat, optimal, dan menghasilkan manfaat maksimal, serta untuk menilai kinerja keuangan secara baik. Rasio Efisiensi diukur dengan membandingkan realisasi belanja terhadap total anggaran belanja.

Rumus yang digunakan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 690.900-327 Tahun 1996, yang juga menetapkan kriteria tingkat efektivitas penerimaan PAD sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Penjelasan Rumus :

- a. Realisasi Belanja = jumlah pengeluaran yang benar-benar dikeluarkan

pemerintah daerah selama satu periode anggaran.

- b. Anggaran Belanja = jumlah dana yang telah direncanakan dan disahkan dalam APBD untuk dikeluarkan selama periode tersebut.

Penjelasan Kriteria :

- a. Tidak efisien: apabila realisasi belanja melebihi 100% dari anggaran.
- b. Kurang efisien: jika realisasi berada antara 90% hingga 100% dari anggaran.
- c. Cukup efisien: realisasi berada pada kisaran 80% hingga kurang dari 90% dari anggaran.
- d. Efisien: pencapaian belanja berkisar antara 60% hingga kurang dari 80% dari anggaran.
- e. Sangat efisien: jika realisasi belanja kurang dari 60% dari total anggaran.


DAFTAR PUSTAKA

- Arini, & Loekman, Z. (2023). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020-2022*. Universitas Trunojoyo. Diakses dari <https://eprints.untag-sby.ac.id>
- Bisri, H. (2023). Analisis Perbandingan Antara APBD, LRA Dan LAKIP Untuk Penilaian Kinerja Kantor CAPILDUK Bojonegoro. *Jurnal Manajemen Dan Penelitian Akuntansi (JUMPA)* ejournal.stiekia.ac.id
- Djemma, S. A., Nurwana, A., & Israq, R. A. B. (2023). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Dinas Perkimta Kabupaten Wajo*. Universitas Hasanuddin. Diakses dari <https://repository.unhas.ac.id>
- Dona, E. M., & Lestari, V. A. (2020). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten OKU*. Universitas Bina Darma. Diakses dari <https://repositori.um-palembang.ac.id>
- Fuad, M., Yanuar, H., & Ramadhan, R. (2020). *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Kementerian Dalam Negeri. (1996). *Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 690.900-327 Tahun 1996 tentang Pedoman Perhitungan dan Penilaian Kinerja Keuangan Daerah*. Jakarta: Kemendagri.
- Mahsun, M. (2017). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Permendagri No. 56 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. (2007). Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Prastowo, S. (2015). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ramadhani, A., & Handayani, S. (2020). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran sebagai Alat Pengendalian Anggaran dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari <https://ejournal.stiedharmaputera.ac.id>
- Rosanti, T. N. A., & Triyanto, E. (2023). *Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan pada Kantor Kabupaten Klaten*. Universitas Sebelas Maret. Diakses dari <https://repository.unwidha.ac>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta



STIE CENDEKIA





PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan :	rus n n
Bidang Pemerintahan :	r n n
Unit Organisasi :	ns r n n oprs ns ro
Sub Unit Organisasi :	ns r n n oprs ns ro

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2022	REALISASI 2022		
	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD				
	tr us r n n yn				
	BELANJA DAERAH				
	BELANJA OPERASI				
	n w n rn ns n us n n ntun os				
	BELANJA MODAL				
	n o n n o r tn n sn n o un n nunn n o n rnn n rs				
	SURPLUS / DEFISIT				
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN SILPA				

		m n r	
Urusan Pemerintahan	:	rus n n	
Bidang Pemerintahan	:	r n n	
Unit Organisasi	:	ns r n n oprs ns ro	
Sub Unit Organisasi	:	ns r n n oprs ns ro	
NO. URUT		URAIAN	ANGGARAN 2022





Urusan Pemerintahan
Organisasi

PEMERINTAH KAB. BOJONEGORO
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, KELOMPOK, DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023



URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro

KODE REKENING				URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000		4	PENDAPATAN DAERAH	12.016.740.212,00	4.201.399.544,00	(7.815.340.668,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000		4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	12.016.740.212,00	4.201.399.544,00	(7.815.340.668,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000		4.1.02	Retribusi Daerah	3.718.718.850,00	1.383.263.500,00	(2.335.455.350,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000		4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.298.021.362,00	2.818.136.044,00	(5.479.885.318,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	14.034.840.300,00	12.688.238.257,00	(1.346.602.043,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02		PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	24.576.500,00	18.297.250,00	(6.279.250,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	3.736.500,00	3.684.000,00	(52.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.01.01		Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	3.736.500,00	3.684.000,00	(52.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	3.736.500,00	3.684.000,00	(52.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.736.500,00	3.684.000,00	(52.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang	20.840.000,00	14.613.250,00	(6.226.750,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.01		Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	20.840.000,00	14.613.250,00	(6.226.750,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	20.840.000,00	14.613.250,00	(6.226.750,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.02.2.02.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.840.000,00	14.613.250,00	(6.226.750,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	5.098.738.865,00	4.698.317.659,00	(400.421.206,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	910.076.947,00	795.236.437,00	(114.840.510,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01		Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	679.775.000,00	622.822.994,00	(56.952.006,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	118.737.509,00	112.453.100,00	(6.284.409,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01	5.1.01	Belanja Pegawai	10.710.000,00	8.160.000,00	(2.550.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.027.509,00	104.293.100,00	(3.734.409,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01	5.2	BELANJA MODAL	561.037.491,00	510.369.894,00	(50.667.597,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	22.500.000,00	21.900.000,00	(600.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.01	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	538.537.491,00	488.469.894,00	(50.067.597,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.02		Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	230.301.947,00	172.413.443,00	(57.888.504,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	230.301.947,00	172.413.443,00	(57.888.504,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	230.301.947,00	172.413.443,00	(57.888.504,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	4.188.661.918,00	3.903.081.222,00	(285.580.696,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.01		Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	220.563.668,00	182.838.800,00	(37.724.868,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	108.063.668,00	73.448.300,00	(34.615.368,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	108.063.668,00	73.448.300,00	(34.615.368,00)

3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.01	5.2	BELANJA MODAL	112.500.000,00	109.390.500,00	(3.109.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.01	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	112.500.000,00	109.390.500,00	(3.109.500,00)
					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.02		Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	3.968.098.250,00	3.720.242.422,00	(247.855.828,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	3.968.098.250,00	3.720.242.422,00	(247.855.828,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.03.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.968.098.250,00	3.720.242.422,00	(247.855.828,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04		PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	601.313.574,00	500.238.582,00	(101.074.992,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	272.099.245,00	246.490.732,00	(25.608.513,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	234.419.459,00	222.959.632,00	(11.459.827,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	234.419.459,00	222.959.632,00	(11.459.827,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	234.419.459,00	222.959.632,00	(11.459.827,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	4.238.200,00	4.034.600,00	(203.600,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	4.238.200,00	4.034.600,00	(203.600,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.238.200,00	4.034.600,00	(203.600,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.03		Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	33.441.586,00	19.496.500,00	(13.945.086,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	33.441.586,00	19.496.500,00	(13.945.086,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.441.586,00	19.496.500,00	(13.945.086,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	279.702.750,00	220.307.950,00	(59.394.800,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.01		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	59.127.000,00	44.302.000,00	(14.825.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	59.127.000,00	44.302.000,00	(14.825.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	59.127.000,00	44.302.000,00	(14.825.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.02		Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	24.663.750,00	10.555.450,00	(14.108.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	24.663.750,00	10.555.450,00	(14.108.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	24.663.750,00	10.555.450,00	(14.108.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.03		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	195.912.000,00	165.450.500,00	(30.461.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.03	5.1	BELANJA OPERASI	195.912.000,00	165.450.500,00	(30.461.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.02.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	195.912.000,00	165.450.500,00	(30.461.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.511.579,00	33.439.900,00	(16.071.679,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.03.03		Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	49.511.579,00	33.439.900,00	(16.071.679,00)

3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.03.03	5.1	BELANJA OPERASI	49.511.579,00	33.439.900,00	(16.071.679,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.04.2.03.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	49.511.579,00	33.439.900,00	(16.071.679,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	211.025.408,00	199.855.215,00	(11.170.193,00)
					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.025.408,00	199.855.215,00	(11.170.193,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.02		Pameran Dagang Nasional	112.477.338,00	108.702.805,00	(3.774.533,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	112.477.338,00	108.702.805,00	(3.774.533,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.477.338,00	108.702.805,00	(3.774.533,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.03		Pameran Dagang Lokal	52.346.070,00	47.485.000,00	(4.861.070,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	52.346.070,00	47.485.000,00	(4.861.070,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.346.070,00	47.485.000,00	(4.861.070,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.04		Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	46.202.000,00	43.667.410,00	(2.534.590,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	46.202.000,00	43.667.410,00	(2.534.590,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.05.2.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	46.202.000,00	43.667.410,00	(2.534.590,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	104.760.216,00	103.896.888,00	(863.328,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	104.760.216,00	103.896.888,00	(863.328,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	101.738.338,00	100.918.888,00	(819.450,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	101.738.338,00	100.918.888,00	(819.450,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	101.738.338,00	100.918.888,00	(819.450,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.02		Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	3.021.878,00	2.978.000,00	(43.878,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	3.021.878,00	2.978.000,00	(43.878,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.06.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.021.878,00	2.978.000,00	(43.878,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	218.562.233,00	200.437.116,00	(18.125.117,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	218.562.233,00	200.437.116,00	(18.125.117,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.01		Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	71.167.628,00	64.645.000,00	(6.522.628,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	68.917.628,00	64.645.000,00	(4.272.628,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	68.917.628,00	64.645.000,00	(4.272.628,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.01	5.2	BELANJA MODAL	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.01	5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.250.000,00	-	(2.250.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.02		Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	104.218.835,00	95.102.300,00	(9.116.535,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	104.218.835,00	95.102.300,00	(9.116.535,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	104.218.835,00	95.102.300,00	(9.116.535,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.03		Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	43.175.770,00	40.689.816,00	(2.485.954,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.03	5.1	BELANJA OPERASI	43.175.770,00	40.689.816,00	(2.485.954,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.07.2.01.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	43.175.770,00	40.689.816,00	(2.485.954,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.775.863.504,00	6.967.195.547,00	(808.667.957,00)

3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55.720.000,00	52.892.800,00	(2.827.200,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.270.700,00	(729.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.01	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.270.700,00	(729.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.270.700,00	(729.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.02		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.720.000,00	10.563.600,00	(156.400,00)
					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.02	5.1	BELANJA OPERASI	10.720.000,00	10.563.600,00	(156.400,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.720.000,00	10.563.600,00	(156.400,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.04		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000,00	8.679.000,00	(1.321.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.04	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	8.679.000,00	(1.321.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	8.679.000,00	(1.321.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.06		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000,00	14.890.500,00	(109.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.06	5.1	BELANJA OPERASI	15.000.000,00	14.890.500,00	(109.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	14.890.500,00	(109.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000,00	9.489.000,00	(511.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.07	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.489.000,00	(511.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.01.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.489.000,00	(511.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.675.485.930,00	4.072.794.613,00	(602.691.317,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.355.820.930,00	3.788.218.558,00	(567.602.372,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.01	5.1	BELANJA OPERASI	4.355.820.930,00	3.788.218.558,00	(567.602.372,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.01	5.1.01	Belanja Pegawai	4.355.820.930,00	3.788.218.558,00	(567.602.372,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	300.000.000,00	265.060.055,00	(34.939.945,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.02	5.1	BELANJA OPERASI	300.000.000,00	265.060.055,00	(34.939.945,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.02	5.1.01	Belanja Pegawai	298.800.000,00	264.760.055,00	(34.039.945,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	300.000,00	(900.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.03	5.1	BELANJA OPERASI	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	9.970.000,00	(30.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.07		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	9.665.000,00	9.546.000,00	(119.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.07	5.1	BELANJA OPERASI	9.665.000,00	9.546.000,00	(119.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.02.07	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	9.665.000,00	9.546.000,00	(119.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.500.000,00	6.385.000,00	(1.115.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03.01		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.500.000,00	2.582.500,00	(917.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03.01	5.1	BELANJA OPERASI	3.500.000,00	2.582.500,00	(917.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	2.582.500,00	(917.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03.06		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4.000.000,00	3.802.500,00	(197.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03.06	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.802.500,00	(197.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.03.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.802.500,00	(197.500,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49.000.000,00	45.076.000,00	(3.924.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.03		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4.000.000,00	3.789.000,00	(211.000,00)

3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.03	5.1	BELANJA OPERASI	4.000.000,00	3.789.000,00	(211.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	3.789.000,00	(211.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.05		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.000.000,00	4.987.000,00	(13.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.05	5.1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	4.987.000,00	(13.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	4.987.000,00	(13.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.09		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000,00	36.300.000,00	(3.700.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.09	5.1	BELANJA OPERASI	40.000.000,00	36.300.000,00	(3.700.000,00)
					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)
KODE REKENING				URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.05.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.000.000,00	36.300.000,00	(3.700.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	698.883.490,00	650.236.383,00	(48.647.107,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.041.500,00	69.983.267,00	(58.233,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.01	5.1	BELANJA OPERASI	70.041.500,00	69.983.267,00	(58.233,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	70.041.500,00	69.983.267,00	(58.233,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	294.916.100,00	255.341.405,00	(39.574.695,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.02	5.1	BELANJA OPERASI	36.221.950,00	36.106.405,00	(115.545,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	36.221.950,00	36.106.405,00	(115.545,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.02	5.2	BELANJA MODAL	258.694.150,00	219.235.000,00	(39.459.150,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.02	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	258.694.150,00	219.235.000,00	(39.459.150,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.03		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.079.900,00	50.864.732,00	(1.215.168,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.03	5.1	BELANJA OPERASI	52.079.900,00	50.864.732,00	(1.215.168,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	52.079.900,00	50.864.732,00	(1.215.168,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.03	5.2	BELANJA MODAL	-	-	-
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.03	5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.300.000,00	20.296.700,00	(3.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.05	5.1	BELANJA OPERASI	20.300.000,00	20.296.700,00	(3.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	20.300.000,00	20.296.700,00	(3.300,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.405.990,00	220.611.304,00	(7.794.686,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.09	5.1	BELANJA OPERASI	228.405.990,00	220.611.304,00	(7.794.686,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.09	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	228.405.990,00	220.611.304,00	(7.794.686,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.11		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	33.140.000,00	33.138.975,00	(1.025,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.11	5.1	BELANJA OPERASI	33.140.000,00	33.138.975,00	(1.025,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.06.11	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	33.140.000,00	33.138.975,00	(1.025,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	184.369.669,00	181.701.038,00	(2.668.631,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.07.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	184.369.669,00	181.701.038,00	(2.668.631,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.07.10	5.1	BELANJA OPERASI	566.357,00	565.000,00	(1.357,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.07.10	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	566.357,00	565.000,00	(1.357,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.07.10	5.2	BELANJA MODAL	183.803.312,00	181.136.038,00	(2.667.274,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.07.10	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	183.803.312,00	181.136.038,00	(2.667.274,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.821.284.415,00	1.686.684.924,00	(134.599.491,00)

3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	572.784.293,00	456.186.117,00	(116.598.176,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.02	5.1	BELANJA OPERASI	572.784.293,00	456.186.117,00	(116.598.176,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	572.784.293,00	456.186.117,00	(116.598.176,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.03		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.383.800,00	40.230.000,00	(153.800,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.03	5.1	BELANJA OPERASI	40.383.800,00	40.230.000,00	(153.800,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.03	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	40.383.800,00	40.230.000,00	(153.800,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.208.116.322,00	1.190.268.807,00	(17.847.515,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.04	5.1	BELANJA OPERASI	1.208.116.322,00	1.190.268.807,00	(17.847.515,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.08.04	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.208.116.322,00	1.190.268.807,00	(17.847.515,00)
					JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / BERKURANG
KODE REKENING					ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)
URAIAN							
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	283.620.000,00	271.424.789,00	(12.195.211,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.01		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	17.000.000,00	14.428.000,00	(2.572.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.01	5.1	BELANJA OPERASI	17.000.000,00	14.428.000,00	(2.572.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.01	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	14.428.000,00	(2.572.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	13.000.000,00	8.242.000,00	(4.758.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.02	5.1	BELANJA OPERASI	13.000.000,00	8.242.000,00	(4.758.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.02	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	13.000.000,00	8.242.000,00	(4.758.000,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.05		Pemeliharaan Mebel	25.000.000,00	24.906.488,00	(93.512,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.05	5.1	BELANJA OPERASI	25.000.000,00	24.906.488,00	(93.512,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.05	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	24.906.488,00	(93.512,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.620.000,00	60.407.550,00	(212.450,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.06	5.1	BELANJA OPERASI	60.620.000,00	60.407.550,00	(212.450,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.06	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.620.000,00	60.407.550,00	(212.450,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.10		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	18.000.000,00	17.854.905,00	(145.095,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.10	5.1	BELANJA OPERASI	-	-	-
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.10	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	-	-	-
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.10	5.2	BELANJA MODAL	18.000.000,00	17.854.905,00	(145.095,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.10	5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	18.000.000,00	17.854.905,00	(145.095,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.11		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150.000.000,00	145.585.846,00	(4.414.154,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.11	5.1	BELANJA OPERASI	62.406,00	54.000,00	(8.406,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.11	5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	62.406,00	54.000,00	(8.406,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.11	5.2	BELANJA MODAL	149.937.594,00	145.531.846,00	(4.405.748,00)
3.30	3.30.2.17.0.00.01.0000	3.30.01.2.09.11	5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.937.594,00	145.531.846,00	(4.405.748,00)
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000		5	BELANJA DAERAH	2.441.090.055,00	1.412.186.292,00	(1.028.903.763,00)
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	2.17.04		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	221.069.590,00	185.190.408,00	(35.879.182,00)
2.17	3.30.2.17.0.00.01.0000	2.17.04.2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	221.069.590,00	185.190.408,00	(35.879.182,00)



PEMERINTAHAN KAB. BOJONEGORO
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	% 2024	REALISASI 2023
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4	PENDAPATAN DAERAH	6.590.545.040,00	4.947.463.576,00	75,07	4.201.399.544,00
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.590.545.040,00	4.947.463.576,00	75,07	4.201.399.544,00
4.1.02	Retribusi Daerah	3.159.000.000,00	1.751.767.500,00	55,45	1.383.263.500,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.431.545.040,00	3.195.696.076,00	93,13	2.818.136.044,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.590.545.040,00	4.947.463.576,00	75,07	4.201.399.544,00
	JUMLAH PENDAPATAN	6.590.545.040,00	4.947.463.576,00	75,07	4.201.399.544,00
5	BELANJA DAERAH	25.605.158.540,00	18.457.336.970,00	72,08	14.100.424.549,00
5.1	BELANJA OPERASI	23.682.711.958,00	16.865.087.617,00	71,21	12.916.906.366,00
5.1.01	Belanja Pegawai	5.057.332.127,00	4.527.916.079,00	89,53	4.061.138.613,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	16.625.379.831,00	12.069.655.288,00	72,60	8.266.502.778,00
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000,00	267.516.250,00	13,38	589.264.975,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	23.682.711.958,00	16.865.087.617,00	71,21	12.916.906.366,00
5.2	BELANJA MODAL	1.922.446.582,00	1.592.249.353,00	82,82	1.183.518.183,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	859.972.582,00	612.243.820,00	71,19	350.525.500,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.062.474.000,00	980.005.533,00	92,24	815.137.778,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0,00	0,00	0,00	17.854.905,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.922.446.582,00	1.592.249.353,00	82,82	1.183.518.183,00
	JUMLAH BELANJA	25.605.158.540,00	18.457.336.970,00	72,08	14.100.424.549,00
	SURPLUS/DEFISIT	(19.014.613.500,00)	(13.509.873.394,00)	71,05	(9.899.025.005,00)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	(19.014.613.500,00)	(13.509.873.394,00)	71,05	(9.899.025.005,00)

Kab. Bojonegoro, 12 Februari 2025

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Ds.

Sukaemi, M.Si
NIP. 196907011990031007

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : KHAFFID NASRULLAH
 NIM : 21020030
 Tahun Angkatan : 2021
 Jurusan/Prodi : Akuntansi
 Semester : DELAPAN
 Judul Skripsi : ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
 DAN BELANJA PERJALANAN DD/LD PADA DINAS
 PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KAB. BUN.
 Dosen Pembimbing : 1. HERMAWAN GUDI PRASETYO, SE., MSA., AK
 2. HASAN BUDI, SE., MSA.

REKOMENDASI						
No.	Tanggal	Pembimbing 1	Paraf	Tanggal	Pembimbing 2	Paraf
1.		Judul Acc		26/03/2025	Judul & Bab A	
2.		Bab I		15/04/2025	Bab 2	
3.		Bab II		23/4/25	Bab 2, 3, 4	
4.		Bab III		30/4/25	Bab 1, 2, 3 Acc	
5.	30/6/25	Bab IV + REVISI		5/6/25	Bab 4, 5 Acc	
6.	1/7/25	Bab V + ACC				
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

Bojonegoro, 7 Juli 2025
 STIE Cendekia Bojonegoro
 Ka. Prodi Akuntansi

Dina Alafi Hidayatin, SE., MA
 NUPTK. 313766667230333



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO**

Jalan Ahmad Yani Nomor 9, Bojonegoro, Jawa Timur
Telepon (0353) 881089, Faksimile (0353) 881089

Laman : <https://dindag.bojonegorokab.go.id> Pos-el : dinasperdaganganbjn@gmail.com,
dinasperdagangan@bojonegorokab.go.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 400.14.5.4/1218 /412.220/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DIYAH ENDRIANI, A.Md
NIP : 19760317 200801 2 018
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Kepegawaian

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : KHAFID NASRULLAH
NIM : 21020090
Prodi : S1 Akuntansi
Kampus : STIE CENDEKIA BOJONEGORO

Telah melaksanakan Penelitian tentang Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Dinas Perdagangan Koperasi Dan Usaha Mikro Kab Bojonegoro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bojonegoro, 14 Agustus 2025

a.n. KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN BOJONEGORO
Kasubbag Umum dan Kepegawaian



DIYAH ENDRIANI, A.Md

Pejabat
19760317 200801 2 018